

# Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2017-2018)

Arif Hidayat\*<sup>1</sup>, Melinda Noer<sup>2</sup>, Erwin<sup>3</sup>  
<sup>123</sup>Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan  
Korespondensi : arifmaho@gmail.com

## Abstrak

*Pelaksanaan Musrenbang kecamatan merupakan rangkaian proses perencanaan yang sangat penting yang menjadi bahan pembahasan pada usulan musrenbang kabupaten sehingga pembahasan musrenbang kabupaten merupakan aspirasi atau keinginan masyarakat, namun di Kecamatan Batang Masumai masih banyaknya usulan yang tidak diterima dan tidak sesuai dengan prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2017-2018). Dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas dengan tiga indikator yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.*

*Hasil penelitian bahwa (1) Mekanisme pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Batang Masumai dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2017 dan 2018 menggunakan dasar hukum yang berbeda dikarenakan terjadinya perubahan dasar hukum. (2) tidak efektifnya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Batang Masumai Tahun 2017-2018 dilihat dari indikator partisipasi bahwa peserta musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Batang Masumai terjadi penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Dilihat dari indikator akuntabilitas/akuntabel bahwa penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan tidak dilakukan sepenuhnya. Dilihat dari indikator transparansi bahwa belum dilaksanakan sepenuhnya pada musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Batang Masumai Tahun 2017 dan Tahun 2018*

**Kata kunci:** Pendidikan, Pelatihan dan Kompetensi Penyuluh Pertanian.

## Abstract

*The implementation of the sub-district Musrenbang is a very important series of planning processes that become the subject of discussion in the district musrenbang proposals so that the district musrenbang discussions are the aspirations or wishes of the community, but in Batang Masumai sub-district there are still many proposals that are not accepted and are not in accordance with the development priorities of the district government. Therefore, researchers conducted a study on the Effectiveness of Implementation of District Development Planning Deliberations (Case Study in Batang Masumai District, Merangin Regency, Jambi Province, 2017-2018). In this study using the theory of effectiveness with three indicators, namely accountability, transparency and participation. Data collection techniques using interview, observation and documentation techniques and data analysis techniques using data collection techniques, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research are that (1) The mechanism for implementing the development planning deliberations of the Batang Masumai sub-district in the last two years, 2017 and 2018 uses a different legal basis due to changes in the legal basis. (2) the ineffectiveness of the Batang Masumai sub-district development planning deliberation in 2017-2018 seen from the participation indicator that the participants of the Batang Masumai sub-district development planning deliberation decreased from 2017 to 2018. Judging from the accountability/accountability indicator that the implementation of the sub-district development planning deliberation was not carried out fully. Judging from*

*the transparency indicator that it has not been fully implemented in the Batang Masumai sub-district development planning deliberations in 2017 and 2018.*

**Keyword:** *Education, Training and Competence of Agricultural Instructor*

## 1. PENDAHULUAN

Dengan perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di daerah mulai dari perencanaan sampai pengawasan menjadi pendorong lancarnya proses demokrasi di segala aspek pembangunan. Keterlibatan masyarakat tersebut diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Hal ini dikarenakan perencanaan dan implementasi pembangunan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kegiatan atau program yang diambil dalam pembangunan harus mengikutsertakan masyarakat dalam pemilihan tersebut.

Perencanaan pembangunan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

1. Penyusunan rencana;
2. Penetapan rencana;
3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi, Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan: (1) Teknokratis, (2) Partisipatif, (3) Politis dan (4) *Top down* dan *bottom up*.

Musrenbang merupakan salah satu media utama bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan pada tahap perencanaan pembangunan. Menurut Sumpeno (2011) Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme "*bottom-up planning*", dimulai dari Musrenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan, dan Musrenbang kabupaten/kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil Musrenbang kabupaten/kota juga digunakan sebagai masukan untuk Musrenbang provinsi, dan Musrenbang nasional. Pelibatan masyarakat, stake holder dan pemangku kepentingan diharapkan, agar seluruh aspirasi, keinginan, kebutuhan serta sumber daya masyarakat dapat dipahami, diserap dan diproses menjadi suatu rencana pembangunan daerah, sehingga dapat direalisasikan dalam bentuk pembangunan-pembangunan di daerah.

Kecamatan Batang Masumai merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Banyak diantara masyarakat di kecamatan Batang Masumai yang sudah ikut terlibat dalam pembangunan. Belum dapat dipastikan apakah hal tersebut disebabkan adanya semacam paksaan atau karena masyarakat memang sudah sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan untuk kebaikan bersama. Sehingga ditemukan gejala-gejala seperti tingginya tingkat respon masyarakat pada pembangunan atau selalu membuka diri jika diminta pertolongan, tingkat kehadiran *stakeholders* seperti tokoh adat dan agama setempat, tokoh pemuda, anggota organisasi kemasyarakatan yang masih rendah yang semata-mata hanya memenuhi undangan pihak kecamatan saja sehingga kehadirannya lebih banyak menjadi pendengar.

Musrenbang kecamatan pada dasarnya bertujuan untuk memadukan usulan rencana pembangunan dari SKPD di wilayah Kecamatan bersangkutan, dengan mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipasi dari tiap-tiap desa. Musrenbang Kecamatan merupakan wadah untuk membahas prioritas

kegiatan hasil musrenbang desa, yang mana hasil musrenbang desa adalah hasil dari usulan-usulan masyarakat sehingga diharapkan dapat mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan pengambilan keputusan bersama-sama pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan ditingkat kecamatan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang efektifitas pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. (2) menganalisis efektivitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

## 2. METODE

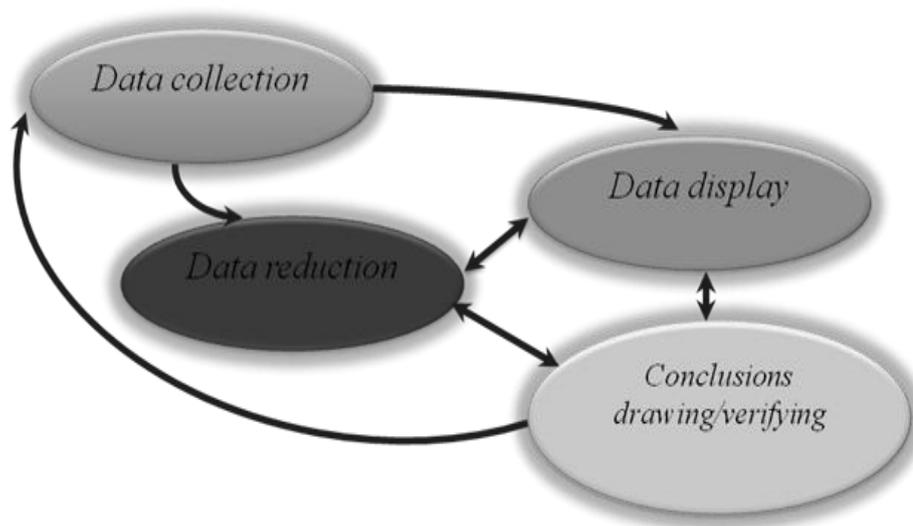
Penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Lebih lanjut Sugiyono (2013) menyatakan yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini informan kunci yang dipilih peneliti sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

No.	Jabatan
1.	Kepala Desa
2.	Tokoh Masyarakat/pemuda
3.	Camat Perencanaan Kec. Batang Masumai
4.	Kepala Badan/Kasubag Perencanaan Bappeda Kab. Merangin
5.	Sekretaris Camat Batang Masumai
6.	Perwakilan UPTD Kecamatan

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban wawancara terasa belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*". Analisis ini dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, perhitungan/penyajian data, analisis dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Adapun model analisis data dalam penelitian ini dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data



### 3.HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin.

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin.

*Berdasarkan wawancara dengan Sapwan yang menyatakan bahwa:*

*Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan. Terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan (wawancara pribadi, Bapak Camat Batang Masumai, 4 Februari 2019).*

Sebagai forum musyawarah tahunan dalam tingkat kecamatan, maka masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan tersebut sekaligus sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun paling lambat pada bulan Februari dengan luaran berupa dokumen rencana pembangunan kecamatan serta masukan untuk renja SKPD kecamatan (*dokumentasi Kecamatan Batang Masumai*).

#### B. Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin.

Efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin Tahun 2017-2018 diukur dari tiga indikator yaitu partisipasi, akuntabilitas dan transparansi, adapun hasil penelitian dan pembahasan pada ketiga indikator tersebut sebagai berikut :

## 1. Partisipasi

Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan harus melibatkan berbagai pihak baik dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, kecamatan dan unit pelaksana tugas lainnya seperti puskesmas, kepala sekolah dll untuk berpartisipasi dalam kegiatan musyarah tersebut. Terkait dengan penelitian ini, peneliti menganalisis partisipasi pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan di kecamatan Batang Masumai pada tahun 2017 dan 2018 melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan wawancara kepada sapwan selaku camat batang masumai, ia mengatakan bahwa :

*Musyawah perencanaan pembangunan kecamatan khususnya dikecamatan batang masumai ini tahun 2017 dan 2018 tingkat partisipasi peserta cukup tinggi, hampir mereka yang kami undang hadir untuk datang menghadiri, meskipun ada beberapa undangan yang tidak hadir dikarena berbagai alasan, tapi kami selaku kecamatan berharap semua peserta undangan dapat hadir agar berita acara di tanda tangan oleh semua unsur agar kemudian hari tidak ada perdebatan-perdebatan lagi.*

Sejalan dengan itu peneliti mewawancarai sekretaris camat yaitu Jaya Kusuma, ia mengatakan bahwa :

*Kalau terkait partisipasi peserta musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan itu cukup tinggi, tapi masih ada juga yang tidak mau hadir dengan alasan bahwa usulan mereka ada yang tidak pernah diterima dan lain-lain, pola pikir peserta yang seperti ini terkadang kami pihak kecamatan kesulitan untuk menghadirkan mereka dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan karena dari pikiran mereka sudah malas untuk hadir.*

**Tabel 4.4. Rekapitulasi Daftar Hadir Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Batang Masumai Tahun 2017**

No	Unsur/instansi	Jumlah
1	Kecamatan	5 (lima) Orang
2	Kepala Desa	10 (Sepuluh) Orang
3	Ketua BPD	10 (Sepuluh) Orang
4	Kepala UPTD	3 (Tiga) Orang
5	Tokoh Masyarakat	4 (Empat) Orang
6	Tokoh Pemuda	4 (Empat) Orang
7	Utusan Dinas/Badan	2 (Dua) Orang
8	Kepala Puskesmas	1 (Satu) Orang
9	Kepala Sekolah	2 (Dua) Orang
	Total	38 (Tiga Puluh Delapan) Orang

**Sumber : Kecamatan Batang Masumai**

Dari data di atas terlihat bahwa tingkat partisipasi dari kehadiran peserta musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Batang Masumai cukup tinggi hal tersebut terlihat dari banyaknya peserta yang hadir terutama dari pemerintah desa bukan hanya itu dari unsur lainnya juga memiliki partisipasi yang cukup tinggi terlihat dari kehadiran kepala UPTD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Utusan Dinas/Badan, Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah meskipun dari total keseluruhan undangan masih terdapat peserta yang tidak hadir seperti kepala UPTD, Kepala Sekolah dan Utusan Dinas/Badan.

Kemudian peneliti menganalisis dokumentasi kehadiran peserta musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Batang Masumai tahun 2018, adapun datanya sebagai berikut :

**Tabel 4.5. Rekapitulasi Daftar Hadir Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Batang Masumai Tahun 2018**

No	Unsur/instansi	Jumlah
1	Kecamatan	5 (lima) Orang
2	Kepala Desa	10 (Sepuluh) Orang
3	Ketua BPD	5 (lima) Orang
4	Kepala UPTD	1 (Satu) Orang
5	Tokoh Masyarakat	2 (Dua) Orang
6	Tokoh Pemuda	1 (Satu) Orang
7	Utusan Dinas/Badan	1 (Satu) Orang
8	Kepala Puskesmas	1 (Satu) Orang
9	Kepala Sekolah	1 (Satu) Orang
	Total	28 (Dua Puluh Delapan) Orang

**Sumber : Kecamatan Batang Masumai**

Dari data diatas terlihat bahwa terjadi penurunan tingkat kehadiran atau partisipasi peserta musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Batang Masumai tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017, terlihat bahwa tiga puluh delapan orang yang hadir pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 hanya dua puluh delapan orang, artinya terjadi penurunan sepuluh orang peserta yang tidak hadir. Terjadinya penurunan tingkat partisipasi tersebut peneliti mewawancarai tokoh pemuda desa salam buku yaitu Ade Kurniawan, ia mengatakan bahwa :

*Partisipasi kami pemuda dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan rendah karena kami terutama saya secara pribadi sudah kecewa terhadap pemerintah kabupaten karena usulan kami banyak yang tidak diterima padahal setiap tahun kami mengusulkan, dari pada kami kecewa lagi lebih baik kami tidak hadir dalam musyawarah tersebut.*

Peneliti juga mewawancarai kepala sekolah Eti, S.Pd, ia mengatakan bahwa :

*Tahun 2017 dulu saya menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Batang Masumai yang diadakan di aula kantor camat, tapi untuk tahun 2018 ini tidak menghadirinya karena saya rasa percuma juga karena usulan untuk sekolah kami tidak diterima dalam mengajukan usul, usulan saya kalah dnegan usulan para kepala desa yang mengusulkan kegiatan pembangunan di desanya, saya juga bingung jadi saya hadir untuk apa.*

Peneliti mewawancarai Sekretaris Camat kembali terkait jumlah usulan yang diterima oleh pemerintah kabupaten, ia mengatakan bahwa :

*Tentang usulan musrenbang kecamatan yang diterima dari Sembilan puluh usulan, yang diterima oleh pemerintah kabupaten hanya lima usulan, artinya banyak desa yang tidak mendapatkan program pemerintah kabupaten, hal ini kan menjadi dilemma atau kurang nyaman kami selaku kecamatan yang diprotes oleh pemerintah desa dan peserta musrenbang kecamatan, saya berharap tahun depan meskipun tidak semua usulan diterima oleh pemerintah kabupaten setidaknya masing-masing atau setiap desa mendapatkan atau adala satu atau dua usulan mereka yang diterima.*

Dari hasil wawancara dan dokumentasi diatas, peneliti melakukan analisis bahwa terlihat partisipasi peserta musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Batang Masumai terjadi penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu dari tiga puluh delapan orang yang hadir pada tahun 2017 menjadi dua puluh delapan orang pada tahun 2018, hal ini disebabkan oleh rasa kekecewaan peserta musrenbang karena banyak usulan mereka yang tidak dapat diajukan seperti dari unsur pemuda, kepala sekolah dan

UPDT dan banyaknya usulan kepala Desa yang tidak diterima oleh pemerintah kabupaten dari sembilan puluh usulan yang diterima hanya lima usulan atau 4,5 persen.

## 2. Akuntabel/Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan khususnya di kecamatan Batang Masumai hal yang sangat penting diperhatikan agar penyelenggaraan musrenbang dapat dilaksanakan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait akuntabilitas musrenbang kecamatan Batang Masumai, peneliti melakukan analisis dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi, adapun hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

Peneliti mewawancarai Camat Batang Masumai, Sapwan, ia mengatakan bahwa :

*“Kami selaku pihak kecamatan telah melakukan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017, mulai dari tahap persiapan ,pelaksanaan dan pasca musrenbang, dalam proses tersebut pada dasarnya kami hanya memfasilitasi musyawarah, terkait substansi musyawarahnya kami menyerahkan secara penuh kepada peserta musyawarah agar hasilnya benar-benar dari peserta, namun yang kami sayangkan yaitu pasca musrenbang yang mana lambatnya input usulan oleh desa, sehingga input usulan dari hasil musrenbang juga sedikit tertunda”.*

Untuk mengkonfirmasi hasil wawancara diatas, peneliti mencoba menguji koherensi pernyataan tersebut dengan salah satu peserta rapat yaitu Kepala Desa Plangki Bapak Azwar, ia mengatakan bahwa :

*Kalau untuk penyelenggaraan musrenbang kecamatan saya secara pribadi mengapresiasi kecamatan yang telah memfasilitasi kami para kepala desa baik fasilitas maupun komunikasi peserta atau moderator kegiatan, yang kami sayangkan dalam kegiatan musrenbang itu terkait sangat sedikitnya dinas/badan dari pemerintah kabupaten yang hadir sehingga kami tidak bisa berkomunikasi banyak terkait usulan kami ditambah lagi kami tidak diberikan rincian program dan kegiatan apa saja yang menjadi program dan kegiatan pemerintah kabupaten, yang ada hanya paparan secara umum saja.*

Dari hasil wawancara camat dan kepala Desa Plangki tersebut terlihat bahwa kecamatan telah melakukan fungsi dan tugasnya selaku fasilitasi musrenbang, namun pada tahap proses pelaksanaan dan pasca musrenbang masih terdapat kendala, mulai dari keterlambatan input usulan ke sistem *e-planning* dan sangat sedikitnya perwakilan dinas/badan dari pemerintah kabupaten yang hadir sehingga komunikasi peserta terhadap usulan sangat terbatas dan ditambah kurangnya informasi rinci terkait program dan kegiatan pemerintah kabupaten.

## 3. Transparansi

Transparansi dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan terlihat dari keterbukaan forum musyawarah dalam berdiskusi yang menghasilkan usulan-usulan yang berkualitas dan tepat sehingga berdampak manfaat bagi masyarakat. Terkait transparansi pada musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Batang Masumai peneliti mengumpulkan beberapa data dari wawancara dan dokumentasi, adapun hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

Peneliti mewawancarai Camat Batang Masumai Bapak Sapwan, ia mengatakan bahwa :

*“Dalam penyelenggaraan musrenbang kecamatan Batang Masumai saya selaku camat sangat mengedepankan transparansi kepada peserta musyawarah, namun keterbatasan kapasitas saya yang hanya memfasilitasi saja jadi tidak banyak informasi yang bisa saya berikan, yang seharusnya banyak memberikan informasi yang transparan itu dinas-dinas dan BAPPEDA, namun sekali lagi tingkat kehadiran mereka dalam musyawarah sangat kurang.”*

Peneliti mewawancarai kepala Desa Plangki, Bapak Azwar terkait transparansi, ia mengatakan bahwa :

*“Transparansi dalam musrenbang kecamatan saya secara pribadi merasakan kurangnya transparansi dari pemerintah daerah kabupaten, seperti program dan kegiatan apa saja yang ada pada dinas saya saja tidak tahu, jadi usulan kami banyak yang tidak diterima dengan berbagai alasan yang membuat kami terkadang belum bisa menerima alasan tersebut karena dokumen jawaban yang mereka bilang tidak sesuai kewenangan kabupaten atau tidak program dan kegiatan pemerintah kabupaten itu yang mana, tunjukkan rincian program dan kegiatan kabupaten baru jawab tidak sesuai. Disini terkadang kami bingung mengusulkan kegiatan apa saja karena saya nilai kurang transparannya pemerintah kabupaten.”*

Sesuai dengan hasil wawancara diatas, peneliti melakukan analisis dokumentasi terkait kegiatan transparansi musrenbang kecamatan batang masumai pada tahun 2017 dan 2018, adapun dokumen tersebut berupa susunan acara kegiatan musrenbang kecamatan Batang Masumai sebagai berikut :

**Tabel 4.11. Susunan Acara Musrenbang Kecamatan Batang Masumai Tahun 2017**

No	Kegiatan/Acara
1	Pembukaan
2	Menyanyikan lagu indonesia raya
3	Doa
4	Sambutan Camat Batang Masumai
5	Materi BAPPEDA
6	Materi DPMD
7	Diskusi/Sidang Pleno
8	Penutup

**Sumber : Kecamatan Batang Masumai**

Dari data tersebut terlihat bahwa materi yang disampaikan hanya oleh dua instansi saja itupun tidak secara teknis dan terperinci, seharusnya dinas-dinas sektoral harus menyampaikan informasi-informasi penting terkait sektornya teruma terkait potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan menjadi program dan kegiatan dinas yang dapat diterapkan di kecamatan Batang Masumai, kehadiran BAPPEDA hanya menyampaikan informasi secara umum atau arah kebijakan. Pada tahun 2018 kegiatan musrenbang Kecamatan Batang Masmuai dengan susuna acara sebagai berikut :

**Tabel 4.12. Susunan Acara Musrenbang Kecamatan Batang Masumai Tahun 2018**

No	Kegiatan/Acara
1	Pembukaan
2	Menyanyikan lagu indonesia raya
3	Doa
4	Sambutan Camat Batang Masumai
5	Materi BAPPEDA
6	Diskusi/Sidang Pleno
7	Penutup

**Sumber : Kecamatan Batang Masumai**

Dari data diatas terlihat bahwa terjadinya penurunan transparansi informasi dari dinas yang terlihat hanya BAPPEDA yang memberikan informasi itupun hanya informasi secara umum tidak rincian kegiatan yang diharapkan oleh peserta musrenbang.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi tersebut pada indikator transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya pada musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Batang Masumai Tahun 2017 dan Tahun 2018 hal tersebut dilihat dari sangat sedikitnya narasumber dari dinas yang memberikan materi terutama rincian kegiatan pemerintah kabupaten yang sangat penting agar usulan yang disampaikan oleh peserta musrenbang dapat diterima.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Mekanisme pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Batang Masumai dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2017 dan 2018 menggunakan dasar hukum yang berbeda dikarenakan terjadinya perubahan dasar hukum yaitu dari Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mana kecamatan Batang Masumai telah mengikuti mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikuti dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan pelaksanaan, namun masih mendapatkan kendala dalam tahap pelaksanaan musrenbang terkait kehadiran narasumber yang sangat sedikit.

Tidak efektifnya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Batang Masumai Tahun 2017-2018 dilihat dari tiga indikator yaitu partisipasi, akuntabilitas dan transparansi sebagai berikut :

- a. Partisipasi peserta musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Batang Masumai terjadi penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu dari tiga puluh delapan orang yang hadir pada tahun 2017 menjadi dua puluh delapan orang pada tahun 2018, hal ini disebabkan oleh rasa kekecewaan peserta musrenbang karena banyak usulan mereka yang tidak dapat diajukan seperti dari unsur pemuda, kepala sekolah dan UPDT dan banyaknya usulan kepala Desa yang tidak diterima oleh pemerintah kabupaten dari sembilan puluh usulan yang diterima hanya lima usulan atau 4,5 persen.
- b. Akuntabilitas/akuntabel penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan tidak dilakukan sepenuhnya hal tersebut terlihat dari kurangnya fasilitasi dari dinas-dinas terutama dalam berdiskusi dengan peserta musrenbang yang sedikit hadir dan kurangnya informasi rincian program dan kegiatan pemerintah kabupaten mengakibatkan kurang tepatnya usulan yang disampaikan sehingga usulan tersebut 95,5 persen ditolak oleh pemerintah Kabupaten dengan berbagai alasan.
- c. Transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya pada musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Batang Masumai Tahun 2017 dan Tahun 2018 hal tersebut dilihat dari sangat sedikitnya narasumber dari dinas yang memberikan materi terutama rincian kegiatan pemerintah kabupaten yang sangat penting agar usulan yang disampaikan oleh peserta musrenbang dapat diterima.

#### 5. SARAN

Berikut beberapa saran dalam efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan yaitu :

1. Pemerintah Kecamatan perlu meningkatkan partisipasi peserta musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan secara keseluruhan baik dari tingkat desa, tingkat kecamatan dengan koordinasi yang intensif

2. Pemerintah kecamatan perlu meningkatkan akuntabilitas musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan meningkatkan kehadiran dinas-dinas sektoral untuk memberikan materi yang dibutuhkan oleh peserta forum dengan melakukan koordinasi yang intensif.
3. Pemerintah kecamatan perlu meningkatkan transparansi musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan meningkatkan materi yang diberikan dalam forum musyawarah sesuai dengan kebutuhan peserta musyawarah diantaranya rincian program dan kegiatan dinas dan batasan-batasan usulan yang dapat diajukan yang berpeluang untuk diterima.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abu Huraerah. 2008. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora
- [2] Adisasmitha, R, H, 2005, Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah, Graha Ilmu, Yogyakarta
- [3] Arikunto, Suharsimi, 2010, Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek, P.T. Rineka Cipta, Jakarta.
- [4] Arthur. Sullivan, Steven M. Sheffrin, 2003, Economics: Principles in Action, Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall, New Jersey
- [5] Budiman, Arief, 2000, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [6] Djumhana, Muhammad. 2007. Pengantar Hukum Keuangan Daerah . Bandung: Citra Aditya Bakti
- [7] Grigg, N, 1988, Infrastructure Engineering and Management, John Wiley & Sons.
- [8] Handyaningrat, Soewarno. 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.Jakarta: Haji Masagung
- [9] Hari Sabarno. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika.
- [10] Huraerah, 2008, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat : Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan, Humaniora, Bandung